



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KESEHATAN  
**UNIT KERJA** : BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BONANZA PERWIRA TAIHITU**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **895387**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.120.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.120.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 15.500.000

1. LAINNYA, CERVELO SEPEDA BALAP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. LAINNYA, WILIER ROAD BIKE Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. LAINNYA, VANMOOF SEPEDA KOTA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 50.000.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 82.879.500

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.268.379.500

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.268.379.500

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.